

**KONSEP BHINNEKA TUNGGAL IKA PERSPEKTIF
ABDULLAH AHMAD AN NA'IM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Syarat Penyusunan Skripsi

**Oleh:
REMBAKAYASA
12510006**

**PROGRAM STUDI AQIDAH FILSAFAT ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI /TUGAS AKHIR

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Rembakayasa

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Rembakayasa

NIM : 12510006

Judul Skripsi : Konsep Bhinneka Tunggal Ika Perspektif Abdullah Ahmad An Na'im

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Aqidah dan Filsafat Islam.

Dengan ini, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut layak diajukan untuk dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Pembimbing



Novian Widiadharna, S.Fil., M.Hum

NIP.19741114 200801 1 009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rembakayasa
NIM : 12510006
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam
Alamat Rumah : Kp.Manggis Hillir RT 05 RW 03, Desa Benda, Kec. Cicurug,
Kab. Sukabumi
Judul Skripsi : Konsep Bhinneka Tungga Ika Perspektif Abdullah Ahmad An
Na'im

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi ini yang telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung dari tanggal Munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 1 (satu) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia dimunaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya saya bukanlah karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaannya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan,



Rembakayasa
NIM. 12510006



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.2248/Un.02/DU/PP.05.3/8/2019

Tugas Akhir dengan judul : Konsep Bhinneka Tunggal Ika Perspektif Abdullah Ahmad An Naim

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rembakayasa
Nomor Induk Mahasiswa : 12510006
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : 90 A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Novian Widiadharna, M.Hum
NIP. 19741114 2008 1 009

Penguji II

Muhammad Fatkhan, M.Hum
NIP. 19720328 199903 1 002

Penguji III

Dr.H. Shofiyullah MZ, M.Ag
NIP. 19710528 200003 1 001

Yogyakarta, 21 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

DEKAN



Dr. Alim Roswanto, M. Ag.
NIP. 19681208 199803 1 002

PERSEMBAHAN

Dengan setulus hati

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya tercinta yang telah mencurahkan seluruh tenaga dan waktunya untuk biaya pendidikan serta mengajarkan banyak hal tentang hidup.

MOTTO

“Yang diberikan oleh sang pencipta adalah yang terbaik untuk kita, tetap syukuri yang ada dan jangan lupa untuk berusaha”

~Rembakayasa~

“Menjadi investor itu bukanlah suatu pilihan, menjadi investor adalah suatu kebutuhan.”

~Nicky Hogan~

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya gerakan yang ingin mengganti sistem negara Indonesia yang republik menjadi negara Islam atau khilafah. Gerakan yang ingin menegakkan sistem Khilafah ini menjadi perhatian banyak kalangan tidak terkecuali Abdullah Ahmad An-Na'im. Dengan alasan kemajemukan An-Na'im menolak sistem Khilafah tersebut. Sama seperti halnya Indonesia yang memilih Bhineka Tunggal Ika sebagai jalan keluar untuk mengatasi permasalahan perbedaan suku, ras dan Agama. Maka dengan itu menarik untuk diadakan penelitian tentang Bhinneka Tunggal Ika melalui perspektif Abdullah Ahmad An-Na'im.

Penyusunan penelitian ini menggunakan merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis-filosofis. Sumber utama penelitian ini adalah pemikiran An-Na'im terkait relasi konsep Negara Ideal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan menjabarkan data secara induktif.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa pandangan An Naim tentang bernegara tertuang dalam konsep negara ideal yang terdiri dari seperangkat aturan, peran dan sumber daya yang ditunjukkan untuk meraih tujuan yang jelas seperti persatuan dan keadilan. Konsep pemikiran An Naim sejalan dengan Bhinneka Tunggal Ika yang mengakomodir kemajemukan di Indonesia dan menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai ideologi bangsa.

Kata Kunci: Bhinneka Tunggal Ika, An Na'im, Negara Ideal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Bhinneka Tunggal Ika Perspektif Abdullah Ahmad An Na’im” ini dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabatnya, dan seluruh umat manusia. Amin.

Tugas akhir ini merupakan karya penulis dengan menempuh perjalanan yang panjang. Perjalanan tersebut dimulai dari sebuah pertanyaan mendasar tentang keberagaman yang ada di Indonesia kemudia dilanjutkan dengan mempertanyakan tentang konsep dan teori yang relevan terhadap keadaan tersebut. Setelah melakukan studi pustaka beberapa artikel dan buku terkait filsafat serta konsep negara dan agama, penulis melihat pemikiran Abdullah Ahmad An Na’im tentang negara ideal terdapat relevansi terhadap konsep keberagaman yang dituangkan dalam semoyan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini kemudian membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Pemikiran Abdullah Ahmad An Na’im sebagai sebuah pemikiran yang dapat diterapkan dalam situasi di Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan ras.

Pada akhirnya penulis mengambil judul “Konsep Bhinneka Tunggal Ika Perspektif Abdullah Ahmad An Na’im” ini sebagai tugas akhir untuk melihat konsep yang dapat diberikan oleh pemikiran An Na’im terhadap perkembangan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Metode yang digunakan yaitu dengan analisis data dan metode induksi. Dengan metode ini penulis menelusuri dan menganalisis beberapa tulisan

terkait pemikiran An Nai'm. Selain itu, penulis juga mengaitkan pemikiran An Na'im dengan Realita yang ada dalam konteks keberagaman yang ada di Indonesia.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menempuh beberapa proses, mulai dari proses bimbingan, diskusi, peminjaman referensi, pencarian referensi materi maupun semangat yang turut mendukung penyusunan skripsi ini selesai. Oleh karena itu, penulis perlu menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Isprayogo Pribadi dan Ibu I'ah Nurhasanah, yang telah senantiasa memberikan dukungan moril dan materil yang tak terhingga.
2. Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
3. Bapak Dr. H.Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Bapak Novian Widiadharma, S.Fil, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, dan kebijaksanaan beliau dalam membimbing penulisan skripsi ini hingga bisa terselesaikan.
5. Bapak Muh. Fatkhan, S.Ag., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam.
6. Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Pimpinan dan staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan layanan kepastakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap Dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, dan seluruh civitas akademik UIN Sunan Kalijaga yang memberi sumbangsih dalam proses penulisan skripsi ini serta seluruh karyawan-karyawati di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
9. TrueCabin sebagai platform usaha yang dirintis oleh penulis memberikan wadah bagi penulis untuk melakukan sebuah usaha yang dapat membantu penulis dalam mengembangkan usaha dan mencari kebutuhan materi sehingga membantu dalam menyelesaikan penulisan ini.
10. Teman-teman IADY yang memberikan motivasi untuk segera lulus.
11. Teman-teman seperjuangan Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2012 yang memberikan motivasi untuk segera lulus.
12. Teman-teman seperjuangan di kontrakan yang memberikan motivasi untuk segera lulus.
13. Teman-teman PAMORRAYA yang memberikan motivasi untuk segera lulus.
14. Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook dan Whatshap yang memberikan wadah bagi penulis untuk melakukan sebuah usaha yang dapat membantu penulis dalam mengembangkan usaha dan mencari kebutuhan materi sehingga membantu dalam menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan ada koreksi, kritik dan saran atas skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Agustus 2019

Penulis,

Rembakayasa

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI /TUGAS AKHIR..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | iv |
| PERSEMBAHAN..... | v |
| MOTTO | vi |
| ABSTRAK | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 4 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| D. Telaah Pustaka | 4 |
| E. Kerangka Teori | 7 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| BAB II PEMIKIRAN ABDULLAH AHMAD AN NA'IM | |
| A. Biografi Abdullah Ahmad An Naim..... | 17 |
| B. Karya Abdullahi Ahmad An-Na'im..... | 20 |
| C. Konstruksi Pemikiran Abdullahi Ahmad An-Na'im | 21 |
| BAB III KONSEP BHINNEKA TUNGGAL IKA | |
| A. Sejarah Bhinneka Tunggal Ika..... | 34 |
| B. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika..... | 39 |
| C. Implementas Prinsip Bhinneka Tunggal Ika..... | 42 |
| D. Bhinneka Tunggal Ika dalam Konteks Indonesia..... | 45 |

BAB IV ANALISA PEMIKIRAN ABDULLAH AN NA'IM TERHADAP KONSEP BHINNEKA TUNGGAL IKA

- A. Analisa Pemikiran An-Na'im**..... 50
 - 1. Persamaan Pemikiran An'Naim dengan Bhinneka Tunggal Ika..... 56
 - 2. Perbedaan antara Pemikiran An-Na'im dengan Bhinneka Tunggal Ika 58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan** 60
- B. Saran** 61

DAFTAR PUSTAKA 62

- A. Buku** 62
- B. Jurnal** 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis dalam lambang Garuda Pancasila. Kalimat yang bermula dari bahasa Jawa kuno karangan Mpu Tantular semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke 14. Bhinneka tunggal Ika dianggap sangat cocok menggambarkan keadaan Indonesia yang begitu majemuk. Frasa yang mempersatukan seluruh perbedaan yang ada di tanah air Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan prinsip yang dipegang dalam mengembangkan heterogenitas bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai basis kesadaran identitas bangsa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kesadaran Bhinneka Tunggal Ika tidak ada ruang untuk melakukan diskriminasi, karena istilah “Tunggal” mencerminkan suasana persamaan dan kesetaraan. Sebagai fasilitator Pancasila telah diimplementasikan dalam bentuk hukum positif, maka tidak berguna tanpa dikawal oleh penegakan hukum.

Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi semboyan, tetapi sebagai landasan utama untuk hidup di Indonesia, apabila tidak adanya kesadaran untuk hidup dengan perbedaan yang ada, maka akan terjadi berbagai konflik yang mengatasnamakan etnis maupun agama. Bhinneka Tunggal Ika adalah konsep yang lahir sebagai jalan keluar untuk bernegara di Indonesia yang dihuni oleh masyarakatnya yang majemuk.

Indonesia telah final dalam pembahasan bentuk negara dan ideologi negara semenjak Indonesia merdeka dari penjajahan. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman. Indonesia terdiri atas banyak suku, budaya, bahasa, agama, dan ras dirangkul menjadi satu kesatuan yang kokoh. Keberagaman yang hidup di negeri Indonesia dikenal dengan semboyan atau konsep “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua.

Beberapa tahun belakang ini, di Indonesia banyak terjadi gerakan radikal yang mengatas namakan agama Islam, dan ada pula kelompok yang ingin merubah sistem negara di Indonesia. Gerakan mensyariahkan Indonesia terdengar begitu kencang dan ramai diberitakan di media masa, media elektronik maupun melalui pengajian-pengajian. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Islam wajib mendirikan suatu negara dengan label negara Islam. Berkaitan dengan hal ini, setidaknya ada tiga pendapat, yaitu: pertama, pandangan yang mewajibkan pendirian negara Islam; kedua, pandangan tentang negara sekuler; ketiga, pandangan yang menyatakan pentingnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam bernegara tanpa harus melabeli suatu negara dengan nama negara Islam.¹

Isu ini menjadi perhatian banyak kalangan termasuk Abdullah Ahmad An Na'im. Dalam pemikirannya beliau mengkritik negara-negara yang ingin mendirikan negara berdasarkan agama seperti di Sudan. Bagi An Na'im hasrat mendirikan negara

¹ Abdul Azis, *Chifdom Madinah Salah Paham Negara Islam* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2011), hal. VIII (kata pengantar Bambang Pranomo, Konsep Negara dalam Islam).

Islam merupakan penghianatan besar. Pendapat An Na'im ini justru mendapatkan tindakan represif. Perspektif syariah yang ditawarkan oleh pencetuskan negara Islam itu bukanlah harga mati. Sebab, syariah yang demikian hanyalah interpretasi.²

An Na'im menegosiasikan adanya pemisahan yang tegas antara persoalan negara dan urusan keagamaan.³ Dengan kata lain, An Naim mengedepankan demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Biarlah agama-agama tumbuh subur di teritorialnya sendiri, seperti rimbunan aneka ragam tanaman di hutan belantara. Negara tidak perlu mengintervensi apalagi mengatur kehidupan agama. Negara hanya bertugas mensejahterakan rakyat tanpa pandang bulu dan membawa embel-embel identitas agama tertentu.

Menurut An Na'im, spirit Islam mengandung gagasan seperti itu. Islam sangat universal, oleh sebab itu kebebasan agama sangat diutamakan dan penghormatan atas Hak Asasi Manusia (HAM) pun juga dijunjung tinggi. Islam dalam bayangan An-Na'im berbeda dengan bayangan orang-orang yang pro-syari'ah atau Negara Islam. Ia mengafirmasi bahwa ajaran keselamatan dan kesucian tersebut harus menjadi bagian dari kenyataan sosiologis di lapangan. Hal ini tentu sangat menarik jika ditelusuri.

Melihat konsistensi An Na'im dalam membahas relasi agama dan negara dalam bernegara, peneliti melihat adanya kesesuaian dan hal yang perlu dibahas terkait

² Abdullah Ahmad An Na'im, *Islam dan Negara Sakular Menegosiasikan Masa Depan Syariah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2007), hlm. 30.

³ Abdullah An-Na'im, *Islam dan Negara Sekular*, hlm. 15.

bernegara di Indonesia, dengan mayoritas penduduk Islam dan hidup dalam kemajemukan jadi menurut peneliti penting dilakukan penelitian dan pengkajian lebih dalam tentang “**Konsep Bhinneka Tunggal Ika Perspektif Abdullah Ahmad An Na’im**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat ditarik rumusan masalah, antara lain

1. Bagaimana pandangan Abdullah Ahmad An Naim tentang konsep negara?
2. Bagaimana hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan konsep negara ideal Abdullah Ahmad An Na’im ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian:

- a. Mengetahui pandangan Abdullah Ahmad Annaim tentang konsep bernegara
- b. Mengetahui hubungan Bhinneka Tunggal Ika dengan konsep Negara pandangan Abdullah Ahmad An Naim.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang relasi agama dan negara telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Untuk menjamin keorisional penelitian ini dan agar tidak terjadi pengulangan riset yang berujung pada situasi tumpang-tindih, maka penulis menyertakan sebuah kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini, penulis menghimpun kembali hasil-hasil riset yang sudah dilakukan para peneliti terdahulu. Berikut skripsi yang telah membahas tentang relasi agama dan negara.

Skripsi karya Ahmad Siddiq dengan judul *Relasi Islam Menurut Abdullah Ahmad An Na'im*. Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library reserach*) yang bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan historis. Dengan tujuan untuk mengetahui sosio-politik yang melatar belakangi pemikiran An Na'im. Kesimpulan penelitian ini, An Na'im mengajukan negara modern dengan konstitusi yang juga modern sebagai pengganti dari syariah. Sebab hanya sistem inilah yang paling menjamin keadilan (*fairness*). Terkait dengan isu-isu relasi Islam dan negara, An-Na'im menolak keras konsep murtad (*riddah* atau keluar dari Islam) dan konsep *dzimmi*. Menurutnya, agama adalah sebuah pilihan. Pluralitas merupakan sebuah keniscayaan, dan perbedaan tidak serta merta disikapi dengan ketidakadilan.⁴

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokus penelitian ini tidak saja kepada hubungan Islam dan negara melainkan lebih fokus kepada pembahasan prinsip negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Skripsi Muhammad Muflihul Minan, *Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Majelis Mujahidin Indonesia Dan Jaringan Islam Liberal*. Penelitian ini merupakan *Library Research*. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Majelis Mujahidin Indonesia meyakini bahwa pemberlakuan syari'at Islam merupakan solusi tepat yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, namun Jaringan Islam Liberal memandang pemberlakuan syari'at Islam hanya bisa dijalankan secara

⁴ Ahmad Siddiq dengan, *Relasi Islam dan Negara Menurut Abdullah Ahmad An Na'im* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006)

substantif dan menyentuh aspek moralitas masyarakat dalam bernegara bukan secara formalis. Menyangkut sistem pemerintahan, biarkanlah agama diambil sari madunya oleh pelaku pemerintahan untuk mengatur relasi masyarakat dan rakyatnya yang plural sesuai dengan kebutuhan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia tanpa ada keberpihakan tetapi tetap mengedepankan prinsip keadilan.⁵

Skripsi Karya Ahmad Rafiq “*Hubungan Islam dan Negara di Indonesia (Dalam Prespektif Muhammad Amien Rais)*”, karya ini adalah karya Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. Dalam kajian penelitian ini penulis lebih fokus kepada pemikiran Amien Rais yang memiliki pemikiran simbiotik tentang hubungan agama (Islam) dan negara, yaitu adanya hubungan timbal balik antara hubungan agama dan negara.⁶

Karya Empan Supandi dalam skripsi “*Islam dan Politik: Kajian tentang Pemikiran Politik Al-Ghazali*”, karya ini adalah karya mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006. Dalam kajian penelitian ini penulis lebih terfokus pada pemikiran al-Ghazali yang berpendapat bahwa pemimpin atau kepala negara dalam masyarakat adalah keharusan agama untuk menciptakan keteraturan dan kesempurnaan hidup di dunia dan akhirat, oleh karena itu al-Ghazali memandang politik Islam bukan sekedar masalah teknis dengan perhitungan kekuasaan saja, akan tetapi ia menekankan perhatiannya pada hal

⁵ Muhammad Muflihul Minan, *Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Majelis Mujahidin Indonesia Dan Jaringan Islam Liberal* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga, 2008)

⁶ Ahmad Rafiq “*Hubungan Islam dan Negara di Indonesia (Dalam Prespektif Muhammad Amien Rais)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).

yang paling mendasar, yakni landasan moral dengan segala aspeknya, baik kepala negara, pejabat negara maupun ulama.⁷

Jurnal karya Gina Lestari yang berjudul *Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multi Kultural Indonesia di Tengah Kehidupan SARA*. Penelitian ini merupakan penelaah komprehensif berkaitan dengan ciri keBhinnekaan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan Multikulturalisme merupakan *given* dari Tuhan, namun Bhinneka Tunggal Ika merupakan titipan dari nenek moyang kita yang harus dijaga dan dilestarikan.⁸

Letak persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian terkini adalah sama-sama meneliti tentang konsep suatu negara dengan pandangan tokoh secara umum. Letak perbedaannya, penelitian terkini fokus kepada pandangan Abdullah Ahmad An Na'im terhadap prinsip negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

E. Kerangka Teori

Menurut pakar tata negara, Miriam Budiarjo, istilah “negara” adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁹ Negara, tambah Miriam lagi, merupakan suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut para warga

⁷ Empan Supandi “*Islam dan Politik: Kajian tentang Pemikiran Politik Al-Ghazali* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2006)

⁸Gina Lestari yang berjudul *Bhinneka Tunggal Ika: Khasanah Multi Kultural Indoensia di Tengah Kehidupan SARA*, Program Studi Ketahanan Nasional (Yogyakarta: UGM, 2015).

⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet.xx (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 38.

negaranya taat kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (*control*) monopolitis dari kekuasaan yang sah.¹⁰

Untuk mengatur pola hubungan pejabat dan rakyat, diperlukan sistem politik yang disepakati bersama. Sistem politik, menurut Dahl dapat didefinisikan sebagai setiap pola hubungan manusia yang kokoh dan melibatkan kendali secara cukup, pengaruh kekuasaan dan kewenangan. Sistem politik yang diyakini dapat membawa negara dan rakyatnya kepada keadaan yang lebih baik adalah demokrasi.¹¹

Menurut pendapat St. Agustinus mengenai negara, baginya negara merupakan hasil dari proses hubungan timbal balik suatu dialektika antara manusia dengan kebutuhan realitas secara sosial politik di lingkungannya. Ia menganalogikan negara sebagai suatu makhluk hidup, Negara berkembang, tumbuh, dan bergerak dinamis, dengan keniscayaan dalam mengalami kehancuran. Bagi Augustinus, negara berkewajiban menjadi agen penjunjung perdamaian, tujuan negara adalah agar manusia secara *holistic* mengabdikan diri dengan pasrah pada keagungan Tuhan.

Negara Tuhan baginya ditengarai dengan adanya keimanan rakyatnya yang kuat, yang selalu diperbarui setiap waktu dengan ritual-ritual penyucian jiwa, dan perlawanan terhadap hawa nafsu, tidak hanya mencari kebahagiaan dunia semata. Karena dengan beginilah tujuan dunia dan akhirat terpenuhi, dengan demikian juga secara pasti kebahagiaan dan perdamaian akan tercapai.¹²

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm 40

¹¹ Robert A. Dahl, *Analisis Politik Modern*, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 4

¹² Nasiwan, *Teori Teori Politik*, (Yogyakarta, FISE UNY Pres, 2007), hlm.123.

Kata “agama” berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, tidak bergerak, peraturan menurut konsep Veda. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “agama” adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut”.¹³

Agama dalam bahasa Arab ialah *din*, yang artinya: taat, takut dan setia, paksaan, tekanan, penghambaan, perendahan diri, pemerintahan, kekuasaan, siasat, balasan, adat, pengalaman hidup, perhitungan amal. Sinonim kata *din* dalam bahasa Arab ialah *milah*. Bedanya, *milah* lebih memberikan titik berat pada ketetapan, aturan, hukum, tata tertib.¹⁴

Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan bahwa agama pada umumnya merupakan suatu sistem kredo ‘tata keimanan’ atau ‘tata keyakinan’ atas adanya suatu yang mutlak di luar manusia. Selain itu ia juga merupakan sistem ritus ‘tata peribadahan’ manusia kepada sesuatu yang dianggap Yang Mutlak, juga sebagai sistem norma ‘tata kaidah’ yang mengatur hubungan antar manusia serta manusia dengan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan itu.¹⁵

Agama juga merupakan sekumpulan ajaran yang bersifat transenden. Semua ajaran diyakini sebagai kebenaran yang tak terbantahkan, sebab ia merupakan agama

¹³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997). hlm. 10

¹⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Agama>. Diakses pada tanggal 9 Mei 2019.

¹⁵ Lukman bin Ma'sa, dalam <http://www.scribd.com/doc/15779945/Agama-Dan-Negara-Pandangan-M-Natsir>, yang dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, (Jakarta: GIP, 2004), hlm. 30, diakses 9 Mei 2019.

yang diturunkan oleh Tuhan melalui Rasul-Nya. Islam sebagai salah satu agama samawi memahami bahwa Tuhan memiliki aturan agung untuk alam semesta ini. Alam semesta raya ini hanya berjalan sesuai aturan yang telah dirancang dengan cermat dan cerdas. Islam meyakini bahwa semesta raya ini merupakan kerajaan Tuhan Allah. Dialah yang menciptakannya. Tuhan yang mengendalikan setiap serat kehidupan kita, dan tidak seorangpun yang dapat lolos dari sisor-Nya.¹⁶

Secara sosiologis Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan yang suci (*the secret*) dan Ia berfungsi mengikat masyarakat bersama-sama dalam kelompok-kelompok.¹⁷ Jadi, secara teologis, Islam dapat diartikan sebagai sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, Ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.¹⁸

Banyak tokoh yang memiliki sudut pandang berbeda tentang konsep-konsep agama dan negara. Dalam diskursus politik Islam sedikitnya ada tiga teori tentang hubungan agama dan negara, di antaranya adalah:

1. Paradigman Integralistik

Paradigma ini menginginkan pengintegrasian antara Islam dan negara, karena

¹⁶ Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa, Asep Hikam, cet VI (Bandung: Mizan, 1998), hlm 66

¹⁷ Mukti Ali dkk., *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Imron Rasyidi (ed.), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 13

¹⁸ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. i.

Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. Paradigma ini terdiri dari dua kelompok, yaitu;

- a. Tradisional, yakni mereka tetap mempertahankan tradisi praktik dan pemikiran politik Islam klasik / abad pertengahan
- b. Fundamentalisme, yakni mereka yang ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia.
- c. Paradigma ini mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara, dalam hal ini tidak bisa dipisahkan (*integrated*), wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*devine cofereignty*), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di tangan Tuhan. Jadi, pandangan ini bersifat teokratis.¹⁹

2. Paradigma Sekularistik

Sekularisme adalah suatu ideologi atau paham hidup yang mengajarkan bahwa agama merupakan masalah pribadi dan masalah subjektif setiap individu yang hanya bermanfaat untuk memenuhi tuntutan kejiwaan. Disamping itu, paham hidup ini memandang agama hanya berhubungan dengan masalah privat, dalam arti masalah-masalah pribadi. Oleh karena itu, urusan kemasyarakatan,

¹⁹ Ahmad Suaedy (*ed.*), *Pergulatan Pesantren Demokrasi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 3

seperti politik, ekonomi, kebudayaan, pengembangan ilmu dan teknologi modern, dalam pandangan sekularisme tidak dapat dan tidak perlu dikaitkan dengan agama.²⁰

Dalam konteks Islam, paradigma sekularistik menolak pendasaran negara pada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara. Menurut paradigma ini, Islam hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan bernegara pengaturannya diserahkan sepenuhnya kepada umat manusia. Masing-masing entitas dari keduanya mempunyai garapan dalam bidangnya sendiri. Sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi.²¹

Paradigma ini memisahkan antara agama (Islam) dengan negara, karena Islam seperti agama-agama lainnya tidak mengatur masalah keduniaan, sebagaimana praktik kenegaraan yang terdapat di Barat. Kaum sekuler menekankan adanya keterpisahan yang nyata diantara keduanya, bagi mereka, Islam dan Politik merupakan dua hal yang berbeda.

3. Paradigma Simbiotik

Dalam pandangan ini, konsep hubungan agama dan negara terdapat interaksi timbal balik dan saling membutuhkan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara

²⁰ Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 34

²¹ M. Arskal Salim, "Islam dan Relasi Agama-Negara di Indonesia" dalam Abdul Mun'im D.Z. (ed.), *Islam di Tengah Arus Transisi*, (Jakarta: Kompas, 2000), cet. 1 hal. 8.

karena dengan negara agama dapat berkembang. Agama akan berjalan baik dengan melalui institusi negara, sementara pada posisi lain negara juga tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama, karena keterpisahan agama dari negara dapat menimbulkan kekacauan dan amoral. Ibnu Taimiyah (1263- 1328 M), seorang tokoh Sunni salafi, mengatakan: “agama dan negara benar-benar berkelindan, tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama dalam keadaan bahaya.”²²

Negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik”. Ia juga mengatakan bahwa wilayah organisasi politik bagi persoalan kehidupan sosial manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Karena tanpanya, agama tidak akan tegak kokoh. Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut melegitimasi bahwa antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan.²³

Paradigma ini menawarkan formalisasi Islam. Namun di dalamnya terdapat nilai-nilai demokratis. Meskipun syari’at agama harus ditegakkan dalam sebuah negara, tetapi tidak membatasi secara mutlak kepada masyarakat Muslim untuk ikut andil dalam menentukan kondisi sosial politik negara.²⁴

F. Metode Penelitian

²² M. Arskal Salim, “Islam dan Relasi Agama-Negara di Indonesia” dalam Abdul Mun’im D.Z. (ed.), *Islam di Tengah Arus Transisi*, hlm. 8

²³ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet.1, hlm. 180.

²⁴ Ahmad Shalaby, *Studi Komprehensif Tentang Agama Islam* (Surbaya: PT. Bina Ilmu, 1988), hlm. 249

Penelitian tentang “Konsep Bhinneka Tunggal Ika Perspektif Abdullah Ahmad An Na’im” merupakan penelitian pustaka (*Library Research*).²⁵ Fokus penelitian ini kepada pemikiran Abdullah Ahmad An Naim tentang Relasi Agama dan negara khususnya terhadap konsep Bhinneka Tunggal Ika.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dalam memenuhi pembahasan penelitian sebagai berikut:²⁶

a. Data Primer

Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemikiran Abdullah Ahmad An’Naim tentang Relasi Agama dan Negara, kemudian data primer yang kedua adalah Konsep KeBhinnekaan di Indonesia.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data pendukung untuk melengkapi pembahasana dala penelitian, yang diperoleh dari buku, penelitian terkait, surat kabar, jurnal, berita elektronik, dan lain-lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulanm data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data primer dan data sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan mulai memetakan dan kemudian

²⁵Winarmo Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandumh: Tarsito, 1990), hlm. 182

²⁶ Winarmo Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, hlm 132

menyimpulkan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 teknik pengolahan data:

- a. Metode Induktif²⁷ yaitu berusaha mempelajari detail-detail bahasan etika multi-religiusitas yang digagas oleh An-Na'im. Dari penelaahan induktif ini diharapkan penulis mampu menemukan beberapa simpulan tentang konfigurasi pemikiran An Na'im.
- b. Metode Deduktif yaitu metode ini mengandaikan perlunya penulis melibatkan banyak sajian penelitian yang telah dilahirkan atau ditulis peneliti lain.

3. Teknik Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptik-analitis. Menguraikan secara keseluruhan pemikiran Abdullah Ahmad An Na'im tentang relasi agama dan negara dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian dianalisa secara sistematis.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini bercorak analisis-filosofis terhadap pemikiran tokoh. Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan historis-interpretatif dan merupakan hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dan mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka penyusun akan mensistematisasikan pembahasan sebagai berikut:

Bab I akan berisi tentang latar belakang pentingnya pembahasan tentang Konsep Bhinneka Tunggal Ika dalam Perspektif Abdullah Ahmad An Na'im, yang kemudian untuk membahasnya dibutuhkan bahan dari sumber primernya merupakan hasil pemikiran Abdullah Ahmad An Na'im, yang kemudian dikelola secara sistematis kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan.

Bab II ini akan membahas tentang tentang profil Ahmad An Naim serta karya dan hasil pemikirannya terutama tentang relasi konsep negara.

Bab III akan berisi tentang pembahasan konsep keBhinnekaan yang ada di Indonesia. Pembahasan dimulai dari lahirnya prinsip keBhinnekaan. Pelaksanaan dan tantangan konsep keBhinnekaan hingga hubungan antara negara dan Bhinneka Tunggal Ika.

Bab IV akan mengulas lebih dalam analisa konsep Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia melalui perspektif Abdullah An Naim.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan analisa penelitian. Dan kemudian untuk menyempurnakan diperlukan saran, agar penelitian ini lebih lengkap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah sebagai berikut

1. An-Naim Mengajukan bentuk Negara Ideal yang bertujuan agar negara menerima perbedaan agama dan budaya yang telah lahir dan berkembang di suatu wilayah. Terbentuknya negara ideal diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dan kesejahteraan maka perbedaan-perbedaan antar wilayah dapat diterima oleh negara. Dengan tujuan mendapatkan keadilan An-Na'im mendorong pemerintah menyediakan *public reason* bagi masyarakat sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat, yang kemudian dijaga dan difasilitasi oleh negara.
2. Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan simbol dari dasar negara republik Indonesia memberikan keterkaitan yang mengatur terhadap proses bernegara dan beragama. Bhinneka Tunggal Ika hadir sebagai instrumen pemersatu bila dihadapkan pada perbedaan agama, suku, bahasa dan letak geografis karena dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika mengakomodir sifat pluralistik. Konsep negara ideal yang dimaksud An-Na'im telah dipraktekkan di Indonesia melalui keberadaan UUD, DPR dan MPR yg menjadi instrument menuju keadilan dan kesejahteraan.

B. Saran

1. Akademisi

- a. Melanjutkan dan memperluas penelitian tentang Bhinneka Tunggal Ika seperti melalui pendekatan agama yang diakui di Indonesia
- b. Menggunakan Bhinneka Tunggal Ika sebagai jembatan pemersatu perbedaan dan mencegah gerakan sparatis oleh kelompok radikal yang mengatasmamakan agama

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Dahl, Robert. *Analisis Politik Modern*, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- A'la al-Maududi, Abu. *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa, Asep Hikam, cet.VI Bandung: Mizan, 1998.
- Ali, Mukti. *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Imron Rasyidi Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmad "Introduction," Mahmud M. Thaha, *The Second Message of Islam*, terj. A.A.N. Wey: Sy Rawl, 1987.
- *Dekonstruksi Syari'ah*, terj. Hamid Suaedy dan Amiruddin Arrani Yogyakarta: LKiS, 1997.
- *Islam dan Negara Sekular Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Bandung: Mizan, 2007.
- Azis, Abdul. *Chifdom Madinah Salah Paham Negara Islam*. Jakarta: Pustaka Alvabet 2011.
- Azra, Azyumardi. *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*. Jakarta: Paramadina, 1996.
- Azra, Azyumardi. *Reposisi Hubungan Negara dan Agama Merajut Hubungan Antar Umat*. Jakarta: Buku Kompas, 2002.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Budiman, Arif, *Teori Negara, Politik, Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- E. Ramage, Douglas, *Percaturan Politik di Indonesia: Demokrasi, Islam, dan Ideologi Toleransi*, alih bahasa Hartono Hadikusumo. Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Jogjakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1985.
- Ismail, Faisal. *Republik Bhinneka Tunggal Ika: Mengurai Isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama dan Sosial Budaya*. Jakarta: Puslitbang kehidupan Keagamaan, 2012.

- L. Berger, Peter. *Desekularisasi Dunia, Tinjauan Global dalam Kebagangkitan Agama dalam Menantang Dunia Politik*, terj. Hasibul Khair. Yogyakarta: Arruz Media, 2003.
- Madjid, Nurcholis. *Islam dan Masalah Kenegaraan, Study Tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Maududi, Abul A'la. *Teori Politik Islam dalam Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah- masalah* oleh John J. Donohue dan John L. Esposito. Cet. III. Jakarta: citra niaga Rajawali Pers, 1993
- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Rais, Amien. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Rusyan, Tabrani. *Seri Pilar Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika: sebagai Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: CV Permata, 2015.
- Salim, M. Arskal. "Islam dan Relasi Agama-Negara di Indonesia" dalam Abdul Mun'im D.Z. (ed.). *Islam di Tengah Arus Transisi*, Jakarta: Kompas, 2000.
- Shalaby, Ahmad, *Studi Komprehensif Tentang Agama Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.
- Suaedy, Ahmad. (ed.). *Pergulatan Pesantren Demokrasi*. Yogyakarta: LKiS, 2000.
- Surakhman, Winarmo. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito, 1990.
- Syafii Maarif, Ahmad. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Syaukani, Imam. *Abdullahi Ahmad An-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokratik*," dalam *Ulumuddin*, Nomor. 2, Tahu11/Juli 1997.
- Tantular, Mpu. *Kakawin Sutasoma*. Terj. Dwi Woro Retno Mastuti dan Hastho Bramantyo. Depok: Komunitas Bambu, 2009.
- Voll, John O. *Transformasi Hukum Islam; Suara Sarjana Aktivistis, Dalam Islamika*, Nomor 1, Juli-September 1993.

B. Jurnal

Abd Mu'id Aris, Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai Pancasila, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1

Turita Indah Setyani, "Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pembentuk Jati Diri Bangsa", Makalah, Konferensi Nasional dan Pembentukan Organisasi Profesi Pengajar Bahasa, Sastra, Budaya, dan Seni Daerah se-Indonesia Di Yogyakarta, 2009